Mahein Nia Lian no. 7, 6 Julhu 2010.

'Ikan yang Semakin Jauh dari Air'

Relasi Sipil dan Militer di Timor-Leste Pasca Kemerdekaan

Pendahuluhan

Meninjau kembali relasi sipil dan militer di Negara-negara pasca-konflik ibarat menggurai benang kusut, definisinya pun beragam. Namun pengertian secara sederhana khususnya dalam Negara yang menganut sistem demokrasi liberal, militer secara institusi seyogyanya berada dibawah kekuasaan sipil lebih tepatnya politik adalah panglima. Maka dalam hal keputusan politik militer harus tunduk pada supremasi sipil.

Dalam prakteknya sistem ini cenderung tidak berjalan sebagaimana mestinya karena militer yang merupakan salah satu institusi paling dominan dalam sebuah Negara seringkali memiliki agenda politiknya sendiri. Seringkali militer lebih tunduk pada desakan kepentingan luar daripada patuh terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis.[1]

Praktek-praktek perebutan kekuasaan di Negara-negara berkembang di Amerika Latin, Asia dan benua Afrika bisa membuktikan pernyataan diatas. Lemahnya relasi antara sipil dan militer serta kuatnya intervensi pihak luar menyebabkan pemerintahan demokratis dimana pun sangat rentan terhadap instabilitas politik.[2]

Persoalan utama dalam kaitannya dengan relasi sipil dan militer adalah apakah militer sebagai institusi benar-benar patuh terhadap supremasi sipil? Perdebatan relasi sipil militer masih terus mengedepankan theori yang dikembangkan oleh Samuel P. Huntington dan Morris Janowitz[3] hampir 50 tahun lalu. Ada keraguan dewasa ini apakah konsep yang dikembangkan oleh dua orang ahli pada Perang Dingin ini masih relevan untuk diterapkan pada situasi sekarang.

Menurut Samuel P. Huntington hubungan sipil-militer menekankan kemampuan militer dalam melindungi nilai-nilai demokratis dan menaklukan ancaman-ancaman dari luar. Sedangkan dari sudut pandang republikan yang dijabarkan oleh Janowitz relasi sipili-militer memperkuat nilai-nilai demokratis—khususnya nilai-nilai moral—dengan mendukung partisipasi sipil melalui pasukan relawan.[4]

---

[1] W.F. Wertheim, Evolution and Revolution*: The Rising Waves of Emancipation.* Penguin Books 1974, p. 147.

[2] Lihat Michael T. Klare & Peter Kornbluh, ed, *Low Intensity Warfare: Counterinsurgency, Proinsurgency, And Antiterrorism in the Eighties.* Pantheon Books 1988.

[3] Lihat Samuel P. Huntington, *Reforming Civil-Military Relations*
Journal of Democracy - Volume 6, Number 4, October 1995, pp. 9-17. Untuk pembahasan lebih lanjut lihat karya Morris Janowitz, *Military Institutions and Coercion in the Developing Nations.* The University of Chigaco Press, 1977.

[4] Lihat Samuel P. Huntington, *Reforming Civil-Military Relations*
Journal of Democracy - Volume 6, Number 4, October 1995, pp. 9-17.

Seringkali dalam prakteknya batasan antara militer dan politik menjadi tidak jelas dan sebagai akibatnya akan muncul ketegangan antara militer dan para elit politisi sipil. Persoalan utamanya sekarang adalah bagaimana bisa memperkuat sebuah institusi militer yang tidak akan memunculkan ancaman terhadap legitimasi sipil.

Dua hal menjadi titik berat dalam memahami relasi antara sipil dan militer. Yakni otoritas sipil yang terpilih melalui pemilihan umum, berdasarkan konstitusi, hukum, mewakili dan bertanggungjawab terhadap warga Negara.

Dalam kaitannya dengan otoritas sipil terhadap militer dalam bentuk pemilihan atau penunjukkan seorang Menteri Pertahanan dan Keamanan, yang memiliki akses yang tidak terbatas terhadap setiap dokumen, institus, perencanaan, dan keputusan perihal pertahanan. Selain itu, otoritas sipil bisa berdasarkan hukum atau dengan terlibat secara aktif dalam setiap keputusan yang diambil oleh institusi militer.

Struktur dan norma seperti dijelaskan diatas kadang tidak selalu berlaku surut. Karena seringkali seorang Presiden yang juga menjabat sebagai Panglima Tertinggi angkatan Bersenjata memiliki kewenangan paling besar dan Panglima Angkatan Bersenjata bertanggungjawab secara langsung kepada sang Presiden.

Mahein Nia Lian kali ini akan mencoba menghadirkan topik yang selama ini tidak diperdebatkan dengan serius yakni hubungan sipil-militer. Falintil-Forca Defeza de Timor-Leste (F-FDTL) dalam setiap perayaan hari jadinya selalu menggunakan slogan 'F-FDTL adalah ikan dan rakyat adalah air.' Pada masa perang kemerdekaan, jargon ini terbukti sangat ampuh ketika rakyat yang berada wilayah perkotaan dan pedesaan dengan semangat memberikan dukungan baik moral maupun material kepada para pejuang Forca Armadas de Libertasaun Nacional de Timor-Leste (FALINTIL).

Dukungan ini dimulai sejak hancurnya zona-zona bebas di pegunungan pada tahun 1978 sampai terselenggaranya jajak pendapat pda 1999. Tetapi setelah kemerdekaan, banyak hal yang telah berubah, dimana FALINTIL bukan lagi sekelompok gerilya berlalu lalang di hutan tetapi telah mentransformasikan diri menjadi angkatan bersenjata profesional yang tunduk pada aturan dan hukum yang telah digariskan dalam sebuah negara demokratis.

Dalam edisi kali ini Fundasaun Mahein berusaha menelusuri kembali relasi sipil-militer sejak perang sipil pada tahun 1975 sampai terbentuknya FALINTIL yang kemudian mengalami transformasi menjadi F-FDTL.

Adapun institusi lain yang tidak luput dari kajian ini adalah peranan dari Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL). Khalayak pembaca mungkin bertanya-tanya disertakannya institusi PNTL dalam pembahasan ini, tetapi pertimbangan Fundasaun Mahein bahwa sejak pembentuk PNTL pada tahun 2002, lembaga ini cenderung diidentikkan atau mengidentikan diri dengan institusi militer. Latihan-latihan ala militer, pengadaan alat-alat perang mutakhir sampai pada tindakan sehari-hari yang cenderung militeristik semakin menambah keyakinan sebagian pengamat bahwa ada element militeristik dalam tubuh institusi ini.

F-FDTL sendiri yang akan menjadi fokus dalam pembahasan ini pun tidak luput dari kritikan sejak sebelum dan sesudah meletusnya krisis politik-militer pada 2006, Perekrutan terhadap generasi baru sebagai usaha penguatan terhadap institusi dan demi mengembangkan kader-kader baru di masa depan seringkali ibarat pedang bertama dua. Hal ini disebabkan oleh kurangnya doktrin militer yang tepat kepada para rekrutan serta pemahaman akan peranan mereka di sebuah Negara demokratis. Masih melekatnya mental militer Indonesia akibat politik militerisasi yang

dikembangkan pada saat pendudukan sangat berpengaruh terhadap Angkatan Bersenjata Timor-Leste selanjutnya.[5]

Pasca kemerdekaan, kesejahteraan para perwira F-FDTL dan anggotanya masih sangat jauh dari memuaskan. Hal ini sering berakibat pada friksi internal di tubuh institusi itu.

Mayor Jenderal Taur Matan Ruak, dalam setiap pernyataanya menegaskan bahwa F-FDTL bukanlah institusi yang tepat untuk mencari pekerjaan. Karena itu setiap orang yang ingin bergabung dengan lembaga ini harus berpikir secara matang. Taur mengkhawatirkan komitmen dari para pengabdi Negara ini di masa depan, menimbang bahwa FALINTIL yang sebelumnya adalah angkatan bersenjata untuk pembebasan harus siap mengubah diri menjadi sebuah institusi modern dalam waktu yang relatif singkat sebagai akibat dari tuntutan komunitas internasional yang menghendaki dipercepatnya masa transisi dan pembentukan institusi-institusi yang mengikuti standar barat.[6]

Dalam perjalananya institusi ini menghadapi banyak persoalan, mulai dari tindakan-tindakan indisipliner dari para anggotanya, pertentangan yang sering terjadi dengan para anggota PNTL, kekerasan terhadap masyarakat sipil dan puncaknya adalah ketika meletus krisis politik militer pada tahun 2006.

Konsep politik adalah panglima dan angkatan bersenjata harus berada dibawah kekuasaan militer seringkali disalapahami, pada tahap ini kepentingan politisi sipil untuk memanfaatkan angkatan bersejata demi mencapai tujuan politiknya tidak bisa dihindari.

Krisis politik militer yang terjadi pada tahun 2006 juga sebagai akibat dari kurangnya definisi terhadap relasi sipil- militer dan konsep seperti apa yang perlu dibangun demi memperkuat hubungan antara angkatan bersenjata dan penduduk sipil.

Dari Soldadu Kolonial ke Tentara Pembebasan Nasional

Setelah penandantangan kesepakatan pada tanggal 5 Mei 1999, FALINTIL praktis berada di pusat kontonisasi di beberapa wilayah dan tidak diperkenankan untuk bergerak dan melakukan kontak senjata baik dengan pihak TNI maupun milisi bentukannya.

FALINTIL sebagai angkatan bersenjata pembebasan dideklarasikan di Aiceremumu, Distrik Aileu pada tanggal 20 Agustus 1975. Embrio dari angkatan bersenjata ini terdiri dari para milisi dan soldadu Portugis serta hanya beberapa orang asli Timor saja yang berpangkat perwira pada waktu itu, salah satunya adalah Rogerio Tiago Lobato, adik kandung dari mendiang Presiden Nicolau Lobato yang berpangkat Letnan muda saat itu. Sebelum berubah menjadi FALINTIL, para soldadu ini berada dibawah kekuasaan Komite Central FRETILIN.[7]

Rogerio kemudian memimpin para pasukan yang tergabung dalam FRETILIN ini untuk melancarkan kontra kup pada tanggal 15 Agustus 1975. UDT kemudian mengundurkan diri ke wilayah perbatasan dengan Indonesia.

---

[5] Lihat Nugroho Katjasungkana, *Dampak Invasi dan Pendudukan Indonesia terhadap Gerakan Pembebaasan Nasional Timor-Leste.* Dalam Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia, Baskara T. Wardaya, dkk. ELSHAM, 2007.

[6] Lihat Laporan Komisi Khusus Independen Untuk Timor-Leste, Oktober 2006.

[7] Lihat laporan akhir CAVR Bab Perlawanan: *Struktur dan Strategi.*

Penggungsian ke wilayah Timor-Barat ini juga menjadi cikal-bakal terbentuknya milisi pro-integrasi yang terdiri dari para anggota Patai UDT dan APODETE dan ditandai dengan penandatanganan deklarasi integrasi pada 30 November 1975 yang menjadi salah satu alat legitimasi bagi militer Indonesia untuk menginvasi kedaulatan Timor-Leste.
Frente Revolusionario Timor-Letse Independente (FRETILIN) kemudian menggungsi ke daerah pegunungan dan membentuk zona-zona bebas dan merencanakan perang rakyat jangka panjang.[8]

Sempat terjadi ketidakjelasan perihal kepemimpinan di tubuh angkatan bersenjata setelah invasi militer Indonesia pada tanggal 7 Desember 1975. Pasca jatuhnya wilayah perbatasan, pasukan-pasukan FRETILIN memilih kembali ke wilayah dimana mereka berasal. Di subdistrik (yang telah diubah menjadi zona) mereka membentuk satuan-satuan kompi di bawah pimpinan komandan zona. Kebanyakan dari komandan ini adalah sersan dalam angkatan bersenjata kolonial Portugis.[9]

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste pada tanggal 28 November 1975, FALINTIL berada di bawah kendali Departemen Pertahanan Nasional yang dipimpin oleh seorang Menteri dan dua orang wakil menteri. Dalam hal ini Menteri Pertahanan Nasional dijabat oleh Rogerio Tiago Lobato yang sekaligus juga menjabat Panglima FALINTIL. Jabatan wakil menteri diduduki oleh Hermenegildo Alves dan Guido Soares. Rogerio Lobato kemudian diutus ke luar negeri untuk menggalang dukungan internasional beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 28 November 1975, kemudian pimpinan beralih ke dua orang wakil menteri tersebut.[10]

Departemen Pertahanan Nasional membawahi Staf Umum yang dipimpin oleh Kepala Staf Guido Soares dan Wakil Kepala Staf Jose da Silva.
Akibat invasi militer Indonesia, struktur FALINTIL menjadi tidak efektif. Pasukan yang berada di bawah kendali para komandan zona yang masing-masing beroperasi relatif independen tanpa komando umum. Mereka lebih banyak bertempur sendiri-sendiri dalam memertahankan zona masing-masing.[11]

Ketidakjelasan serta terpusatnya rantai komando di tangan segelintir pemimpin partai yang tidak berdomisili di satu tempat juga menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi sangat lamban di saat-saat genting ketika musuh melakukan ofensif secara gencar.

Kondisinya semakin parah ketika para pemimpin teras politik dan militer menjadi korban dalam serangan militer Indonesia. Para soldadu yang kehilangan arah dan mengalami demoralisasi karena fakumnya kepemimpinan memilih berada di tengah keluarga dan komunitas mereka sendiri ketimbang berjuang untuk menghalau musuh.

Konflik-konflik internal antara para komandan angkatan bersenjata dan sayap politik berimbas ke bawa dan terjadi penyingkiran-penyingkiran terhadap golongan yang reaksioner dan anti revolusi. Kontradiksi internal ini berakibat pada penyerahan

[8] Lihat Helen Hill, *Stirring of Nationalism in East Timor: Fretilin 1974-1978, The Origins, ideologies and strategies of a nationalist movement.* Otford Press, 2002.
[9] Lihat Helen Hill, *Stirring of Nationalism in East Timor: Fretilin 1974-1978, The Origins, ideologies and strategies of a nationalist movement.* Otford Press, 2002.
[10] Lihat laporan akhir CAVR Bab Perlawanan: *Struktur dan Strategi.*
[11] Lihat Carmel Budiardjo and Liem Soei Liong, *The war Against East Timor.* Zed Books, 1984.

secara besar-besaran para gerilyawan beserta peralatan perangnya ke dalam kekuasaan militer Indonesia. Eliminasi terhadap kelompok yang berbeda haluan juga mengakibatkan tumbuhnya sentimen pribadi kelompok tertentu terhadap gerakan perlawanan yang akhirnya melahirkan sentimen pro-Indonesia setelahnya.[12]

Terjadi perubahan pada pertengahan tahun 1977, dalam kaitannya dengan konflik di tubuh FRETILIN. Komite Sentral FRETILIN dalam pertemuannya di Aikurus (Remexio, Aileu) menghapuskan Departement Pertahanan Nasional, termasuk dua posisi wakil menteri pertahanan. Keputusan ini berdasarkan evaluasi yang dilakukan menyimpulkan bahwa ke dua departemen ini tidak berfungsi dengan baik. Kepemimpinan FALINTIL kemudian berpusat pada Staff Umum FALINTIL. Ada juga perubahan dalam sistem kepangkatan dimana kedua wakil menteri pertahanan "diturunkan" jabatannya menjadi komandan sektor[13].

Dalam tahap ini, belum ada pemisahan yang jelas antara FALINTIL sebagai angkatan bersenjata dari induknya FRETILIN. Semua keputusan tertinggi masih tetap dipegang oleh Komite Sentral FRETILIN sebagai organ tertinggi dan prinsip politik sebagai panglima tetap dianut.

Kondisi ini tetap tidak berubah sampai Xanana Gusmão mengambil alih kepemimpinan pada 1980 sepeninggal Presiden Nicolau Lobato pada 1978. Tetapi harus ditegaskan bahwa beberapa perubahan kecil sempat dilakukan oleh Xanana Gusmão. Hal yang terpenting adalah dimulainya proses re-organisasi dimana para gerilyawan yang sebelumnya berkonsentrasi di wilayah tertentu mulai disebarkan ke wilayah-wilayah yang lain. Dalam Konferensi Nasional di Maibai pada bulan Maret 1981, Xanana mulai berusaha untuk memisahkan struktur militer dari politik walaupu perubahan ini dalam kenyataannya sulit untuk dicapai.[14]

Pada tahun 1988, setelah pembentukan Conselho Nacional de Resistência Maubere (CNRM) atau Dewan Nasional Perlawanan Maubere Xanana Gusmão memutuskan untuk keluar dari Fretilin dan menegaskan bahwa FALINTIL tidak lagi menjadi bagian dari FRETILIN. Pada tahap ini Xanana Gusmão mencoba memisahkan sayap bersenjata dari keputusan-keputusan politik, terpusatnya kepemimpinan teras FRETILIN di diaspora turut mempengaruhi kebijakan baru ini, serta konflik internal antara para pemimpin FRETILIN di pengasingan turut mempengaruhi keputusan ini. Praktis Xanana mengambil keputusan-keputusan militer berdasarkan tuntutan pada saat itu yang kadang tanpa melakukan konsultasi dengan para pemimpin FRETILIN di pengasingan.[15]

Pada saat berada di zona-zona bebas, ada relasi yang sangat kuat antara kalangan sipil yang menggungsi ke pegunungan dengan sayap bersenjata FALINTIL.[16] Ikatan ini semakin erat ketika rakyat menjadi tulang punggung dalam menyediakan logistik dan kebutuhan lainnya bagi para gerilyawan dalam berhadapan dengan tentara pendudukan.[17]

---

[12] Lihat Sara Niner, *Xanana: Leader of the Struggle for Independent Timor-Leste.* Australia Scholarly Publication, 2009.
[13] Laporan Akhir CAVR, Bab *Perlawanan Struktur dan Strategi.*
[14] Lihat Sara Niner, *Xanana: Leader of the Struggle for Independent Timor-Leste.* Australia Scholarly Publication, 2009.p.73
[15] Lihat John G. Taylor, *East Timor: The Price of Freedom.* Zed Books, 1999.
[16] Wawancara dengan Filomeno Paixao, Komandan Umum F-FDTL, Tasi Tolu, Dili 2 Juli 2010.
[17] Lihat Sara Niner, *Xanana: Leader of the Struggle for Independent Timor-Leste.* Australia Scholarly Publication, 2009.

Relasi ini pun masih terjalin ketika banyak penduduk sipil yang menyerah kepada pemerintahan pendudukan. Mereka yang menyerah ini kemudian membangun jaringan bawah tanah yang sangat kuat dalam mendukung gerakan perlawanan.

Meskipun dalam perjalanannya muncul ambiguitas perihal relasi antara sipil dan militer ini. Hal ini diakibatkan oleh tekanan yang makin kuat di bagian barat Timor-Leste oleh militer Indonesia, menyebabkan gerakan perlawanan lebih berkonsentrasi di bagian Timor, terutama di wilayah seperti Lospalos, Viqueque dan Baucau. Sentimen etno-nasionalisme kerap muncul bahkan sampai saat ini bahwa penduduk di bagian Timur lebih banyak menjadi korban ketimbang bagian barat. Hal ini juga diakibatkan oleh persoalan pemahaman sejarah perjuangan Timor-Leste yang belum utuh di kalangan penduduk Timor-Leste.

Pemisahan FALINTIL dari FRETILIN juga membawa pengaruh yang sangat signifikan untuk perjuangan selanjutnya. Ketika meletus pembantaian 12 November 1991, banyak pemuda yang melarikan diri ke hutan dan bergabung dengan FALINTIL. Para pemuda ini tidak terpengaruh dengan politik orang tua mereka di masa lalu.[18]

Namun sejarah mencatat bahwa peranan FALINTIL sebagai pelindung rakyat Timor-Leste sangat dipertanyakan pada tahun 1998 ketika pemerintahan Habibie di Indonesia mengumumkan dua opsi untuk rakyat Timor-Leste. Pembentukan milisi-milisi sipil oleh militer Indonesia untuk melancarkan terror dan intimidasi terhadap penduduk Timor-Leste yang pro-kemerdekaan, pelanggaran HAM dalam skala besar adalah situasi dianggap normal pada waktu itu. Pada tahap ini , karena murni tunduk pada perintah garis komando, FALINTIL tidak mengambil tindakan apapun dalam mencegah kekerasan-kekerasan itu.

Supremasi Sipil dan Peranan Militer di Timor-Leste

Pada tahun 1999 ketika Xanana Gusmão yang menjabat sebagai Panglima FALINTIL dan Presiden CNRT kembali ke Timor-Leste setelah mendekam selama 7 tahun di penjara. Xanana Gusmão kemudian memutuskan untuk tinggal dengan para komandan dan gerilyawannya di Distrik Aileu. Banyak pertanyaan bermunculan dalam kaitannya dengan keputusan Xanana Gusmão ini, sangat kelihatan bahwa Xanana lebih mengidentikkan diri dengan militer ketimbang kalangan sipil. Dalam salah satu wawancaranya dengan surat kabar termuka Australia, di kediamannya di Aileu, Xanaan menegaskan bahwa “Saya lebih menjadi komandan FALINTIL daripada Presiden CNRT.”[19]

Sentralisasi kekuasaan di tangan Xanana Gusmão sangatlah signifikan. Dia adalah Presiden CNRT yang dipilih secara aklamasi dan sekaligus menjadi Panglima tertinggi FALINTIL. Pada saat yang bersamaan, wakil komandan Taur Matan Ruak, juga menjabat sebagai anggota Dewan Transisi CNRT. Dalam hal ini dominasi kubu militer sangatlah dominan dibandingkan dengan partai-partai politik seperti UDT, PST, FRETILIN dan Organização Popular *da* Mulher Timorense (OPMT) atau organisasi kaum perempuan masing-masing diwakili oleh satu orang.[20]

Kedekatan Xanana Gusmão dengan FALINTIL ini semakin bertolak belakang dengan komitmenya serta prinsip-prinsip yang terkandung di dalam dokumen

[18] Lihat Irena Cristalis, *East Timor: A Nation’s Bitter Dawn.* Zed Books, 2009. p. 300

[19] The Australian, Desember 1, 1999.

[20] Lihat George Yunus Aditjondro, *Timor Lorosa’e On the Crossroad: Timor Lorosa’es transformation from Jakarta’s Colony to a global capitalist outpost.* CeDSoS, 2001.

Rancangan Perdamaian CNRT bahwa Timor-Leste akan membangun sebuah negara 'tanpa angkatan bersenjata.[21]

Dalam rancangan Perdamaian yang diluncurkan oleh CNRM pada tahun 1999 menegaskan bahwa Timor-Leste yang merdeka tidak akan membentuk sebuah angkatan bersenjata dan mengusulkan untuk mentransformasi para mantan anggota FALINTIL ke dalam kesatuan Polisi dengan mengadopsi konsep Gendermerie dari Prancis.[22]

Tendensi untuk mempolisikan para bekas gerilyawan FALINTIL sebetulnya sudah dimulai pada akhir November 1999, ketika sekitar 55 orang gerilyawan dimobilisasi dan bergabung di dalam keamanan sipil yang dibentuk oleh UN dalam memberikan keamanan terhadap institusi-institusi publik.

Tetapi semuanya berubah secara drastis ketika pada pertengahan Desember 1999, Falur Rate Laek yang merupakan salah seorang komandan senior di F-FDTL dan pasukannya ditempatkan di wilayah perbatasan dengan tujuan meredakan ketegangan antara penduduk di perbatasan, kebanyakan adalah mereka yang menjadi korban milisi yang ingin membalaskan dendam mereka terhadap para milisi.[23]

Tensi yang terus meningkat di perbatasan dan hubungan diplomatik dengan Indonesia yang belum sempat terjalin pada waktu itu, menyebabkan Xanana Gusmão dan para komandan lainnya berubah pikiran. Xanana Gusmão menegaskan bahwa pada dasarnya dia ingin Timor-Leste meniru apa yang dilakukan oleh Costa Rica, sebuah negara tanpa pasukan reguler. Tetapi beberapa alasan keamanan yang disebutkan sebelumnya serta adanya issue bahwa militer Indonesia akan membangun pangkalanya di perbatasan Timor Barat mendorong niatnya untuk memikirkan kembali tentang masa depan FALINTIL.[24]

Senada dengan Xanana Gusmão, Taur Matan Ruak ketika ditanya perihal apa yang menjadi jaminan bahwa FALINTIL tidak akan mengulangi sejarah kelam militer Indonesia di masa lalu dengan doktrin dwifungsi-nya. Taur menegaskan berdasarkan pengalaman mereka yang berjuang melawan militer Indonesia selama 24 tahun dan juga sebagai korban dari dwifungsi ABRI, sangatlah tidak mungkin bagi FALINTIL untuk mengulangi kesalahan yang sama.[25]

Akhirnya nama FALINTIL benar-benar diubah menjadi Falintil Forsa Defeza de Timor-Leste (F-FDTL) pada tanggal 2 Februari 2001, Taur Matan Ruak diangkat menjadi Panglima F-FDTL dengan pangkat brigadir jenderal dan dibantu oleh beberapa perwira berpangkat letnan kolonel dan kolonel.

Ditandai dengan perekrutan besar-besaran setelahnya, FALINTIL mempunyai target untuk merekrut sekitar 3000 personel dan ini dianggap cukup untuk mengatasi ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Batalyon pertama F-FDTL dilantik pada

---

[21] Lihat pidato pembelaan Xanana di depan Pengadilan Indonesia tahun 1993 dalam Sara Niner *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmao.* Aurora books, 2000.

[22] Lihat George Yunus Aditjondro, *Timor Lorosa'e On the Crossroad: Timor Lorosa'es transformation from Jakarta's Colony to a global capitalist outpost.* CeDSoS, 2001.

[23] Lihat George Yunus Aditjondro, *Timor Lorosa'e On the Crossroad: Timor Lorosa'es transformation from Jakarta's Colony to a global capitalist outpost.* CeDSoS, 2001. p. 22.

[24] Lihat Sara Niner, *Xanana: Leader of the Struggle for Independent Timor-Leste.* Australia Scholarly Publication, 2009.

[25] Lihat George Yunus Aditjondro, *Timor Lorosa'e On the Crossroad: Timor Lorosa'es transformation from Jakarta's Colony to a global capitalist outpost.* CeDSoS, 2001.

2001 dan belum sempat memulai tugasnya karena UNTAET[26] menggangap bahwa FALINTIL tidak memiliki mandat yang jelas.[27]

Cobaan untuk angkatan bersenjata yang baru dibentuk ini seolah terus berlanjut. Pada tahun 2000 UN dengan segera merekrut anggota polisi yang baru dan melakukan test terhadap sebagian besar anggota Polisi pada masa pendudukan militer Indonesia. Pelatihan dasar dimulai pada bulan Maret 2000 dan pada 2001 kelompok pertama dari rekrutan ini melakukan patroli bersama dengan polisi PBB.[28]

Di lain pihak, PNTL dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik dan memperoleh gaji yang layak. Hal ini semakin memperuncing pertentangan antara PNTL dan F-FDTL. F-FDTL mengklaim bahwa mereka telah berjuang selama 24 tahun dan menuduh PNTL dipenuhi element-element bekas anggota polisi pada zaman Indonesia.[29]

Pada beberapa kesempatan sering terjadi kontak fisik antara oknum-oknum F-FDTL dan PNTL. Pada tahun 2006, PNTL berkekuatan 3000 anggota dilengkapi dengan persenjataan modern tetap secara institusi sangatlah lemah.

Rentanya institusi PNTL ini bisa diamati dari ketidakmampuan mereka dalam meredakan kekacauan yang terjadi di Dili pada tanggal 28 April 2006. Ketidakmampuan PNTL ini memaksa Perdana Menteri saat itu, Mari Alkatiri untuk meminta intervensi dari F-FDTL dalam mengatasi amukan dari masa petisioner yang dipimpin oleh Gastao Salsinha.

Pamor F-FDTL sendiri berada diujung tanduk dengan adanya issue bahwa F-FDTL telah melakukan pembantaian terhadap sekitar 60 orang di Tasi-Tolu.[30] Walaupun pada akhirnya tuduhan ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

Xanana Gusmão yang saat itu menjabat sebagai President RDTL dan Panglima Tertinggi F-FDTL cenderung 'menggail di air keruh' dengan membiarkan Alfredo Reinado bergerak secara bebas dengan anak buahnya dan kelihatan dengan jelas Komandan Polisi Militer ini merupakan sekutu Xanana yang sangat efektif dalam menentang pemerintahan Alkatiri saat itu.[31]

Puncak dari krisi politik militer adalah digulingkannya pemerintahan Mari Alkatiri, tiga puluh delapan orang tewas (dua puluh tiga diantaranya adalah penduduk sipil, dua belas orang anggota PNTL dan tiga orang anggota F-FDTL). Alfredo sendiri akhirnya tewas di kediaman President Ramos Horta, ketika berusaha menyerang sang President pada 11 tanggal February 2008. Salsinha dan para anggotanya yang pada saat bersamaan melakukan pengepungan dan penyergapan terhadap Perdana Menteri Xanana Gusmão pada akhirnya menyerahkan diri pada tahun 2008 setelah pemerintah mengadakan operasi gabungan antara PNTL-dan F-FDTL.

---

[26] Kepala dari Misi PBB adalah Sergio Vierra de Mello

[27] Lihat Irena Cristalis, *East Timor: A Nation's Bitter Dawn.* Zed Books, 2009.

[28] Total perekrutan pada waktu itu sekitar 1700 orang dan menjalani pelatihan dasar selama 3 bulan, sedangkan 370 orang eks polisi Indonesia memiliki pemahaman yang lebih bagus dan menyelesaikan pelatihan hanya dalam empat minggu. Lihat Irena Cristalis, *East Timor: A Nation's Bitter Dawn.* Zed Books, 2009. p. 300

[29] Lihat Irena Cristalis, *East Timor: A Nation's Bitter Dawn.* Zed Books, 2009. p. 300

[30] Komisi Penyelidik Independen PBB menegaskan bahwa mereka tidak menemukan bukti subtansial tentang rumor ini dan menggangap bahwa ini hanya sekedar rumor. Laporan Komisi Khusus Independen Untuk Timor-Leste, Oktober 2006.

[31] Lihat Irena Cristalis, *East Timor: A Nation's Bitter Dawn.* Zed Books, 2009.

Apa lagi yang Perlu Dilakukan ke depan?

Krisis politik militer pada tahun 2006 benar-benar menempatkan institusi PNTL dan F-FDTL pada titik yang paling rendah. Ketidakharmonisan antara kedua institusi yang telah berlangsung sejak pembentukannya serta adanya persoalan internal di tubuh F-FDTL turut menyumbang pada pecahnya kekacauan sampai tewasnya Alfredo beserta seorang anak buahnya di kediaman President Ramos Horta pada tanggal 11 Februari 2008.

Situasi pasca krisis yang mengantarkan Xanana Gusmão ke pucuk kekuasaan sebagai Perdana Menteri. Patut diakui bahwa terjadi berbagai perkembangan di tubuh angkatan bersenjata Timor-Leste. Pengembangan secara institusi terus dilakukan, profesionalisme terus ditingkatkan.

Berbagai pelanggaran terhadap kaum sipil masih terus terjadi setelahnya. Yang paling mutakhir adalah pelanggaran yang dilakukan oleh para oknum PNTL dan F-FDTL pada saat operasi gabungan dalam mengejar Salsinha dan para anggotanya.

Dalam sebuah liputan yang disiarkan oleh TVTL[32] dua tahun setelah operasi gabungan menunjukkan dengan jelas pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota F-FDTL dan PNTL. Kekerasan terhadap kaum sipil dan tindakan sewenang-wenang lainnya turut menyertai berlangsungnya operasi itu.

Hak-hak ekonomi dari para petani juga benar-benar dilanggar pada saat berlangsungnya operasi. Penduduk dilarang untuk memetik kopi di ladang mereka, yang menyebabkan sebagian besar kopi mengalami kerusakan dan berdampak pada kurangnya pemasukan para petani dalam membiayai hidup sehari-hari.

Tidak berhenti sampai disini, pada bulan Desember 2009, seorang pemuda (Uka, red) yang sedang merayakan natal dengan teman-temanya di kawasan Delta, Komoro ditembak oleh oknum yang tidak dikenal. Penangkapan kemudian dilakukan terhadap seorang anggota PNTL, tetapi kemudian dilepaskan kembali karena dianggap tidak cukup bukti.

Cara para anggota PNTL menanggani para demonstran pun tidak lepas dari sorotan. Penangkapan secara paksa terhadap para mahasiswa UNTL ynag melakukan demo di kampusnya pada tahun 1999, dianggap berbagai pihak sebagai tindakan yang tidak profesional dan merupakan upaya dalam membungkam kritik publik.[33]

Daftar kekerasan yang dilakuan PNTL terus bertambah dari waktu ke waktu. Mulai dari pemukulan terhadap kaum sipil di Atauro, operasi terhadap kelompok ninja di Ermera, Suai dan Bobonaro hanyalah kasus-kasus yang sempat diliput oleh media dan diketahui oleh khalayak umum.[34]

Sejak Xanana Gusmão menjadi Perdana Menteri, sistem kepangkatan di tubuh F-FDTL pun telah mengalami perubahan. Taur Matan Ruak yang sebelumnya berpangkat brigadir jenderal dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal, Lere Anan Timor dinaikkan pangkatnya menjadi brigadir jenderal dan dibantu oleh beberapa orang perwira berpangkat letkol. Pelantikan dilakukan tepat pada hari ulang tahun RDTL pada tangal 28 November 2009 yang ke-35.

Kejanggalan lainnya adalah dalam hal kenaikan pangkat khususnya di tubuh PNTL. Kelihatan sangat jelas bahwa promosi yang dilakukan oleh pemerintah tidak

[32] TVTL, Januari 2010 mengenai Operasi Gabungan antara F-FDTL dan PNTL di Ermera.
[33] Lihat Mahein nia Lian, Edisi ke 6, Juni 2010.
[34] Lihat Mahein nia Lian, Edisi ke 6, Juni 2010.

berdasarkan pada jenjang kepangkatan dan batasan waktu yang harus ditetapkan bagi setiap anggota PNTL untuk mendapatkan promosi. Karena itu seringkali terjadi kerancuan dimana seorang anggota PNTL berpangkat lebih tinggi daripada komandanya sendiri yang menyebabkan hirarki di dalam institusi kepolisian menjadi tidak jelas dan kabur.

Perekrutan-perekrutan baru terus dilakukan untuk menggantikan separuh dari prajurit F-FDTL yang menarik diri dari markas mereka pada saat meletusnya krisis politik militer pada 2006. Kerjasama dengan negara lain terus dilakukan dalam usaha meningkatkan kapasitas para prajurit dan calon perwira F-FDTL ke depannya.

Ancaman lain terhadap stabilitas di masa depan adalah ketidakseimbangan dalam hal perekrutan. Berbagai sumber menunjukkan bahwa 60.3% anggota F-FDTL berasal dari bagian timor sedangkan 34.5% berasal dari Distrik Dili. Angka ini terbilang sangat signifikan, menimbang bahwa jumlah penduduk di bagian barat lebih banyak dari tiga distrik di bagian Timor.[35]

Yang menjadi keprihatinan lain adalah perkembangan dari PNTL sendiri. Institusi ini cenderung mengembangkan dirinya dengan kaidah-kaidah militer dan banyak dari para anggotanya yang cenderung bertindak militeristik. Banyak eks polisi Indonesia di dalam tubuh PNTL yang diyakini masih menganut mental kolonial, termasuk cara mereka menanggani persoalan di dalam masyarakat lebih mengedapkan aksi fisik ketimbang persuasif.[36]

Dilain pihak perekrutan baru yang kebanyakan mengikutsertakan para eks klandestine dan veteran FALINTIL tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Minimnya pelatihan dalam hal hak-hak dasar negara, hak-hak asasi manusia dan keahlian lainnya turut menyumbang pada meningkatnya kekerasan terhadap penduduk sipil.

Para petinggi F-FDTL bukannya tidak menyadari hal ini. Dalam usaha mereka untuk lebih mendekatkan F-FDTL sebagai institusi dengan masyarat, mereka berencana menempatkan berbagai kesatuan mulai dari Lospalos sampai ke Oecusse. Secara sekilas memang mirip dengan sistem teritorial yang diterapkan di Indonesia pada saat rezim Soeharto.[37] Tapi Komandan Umum F-FDTL Filomeno Paixao menjelaskan bahwa banyak masyarakat di pelosok Timor-Leste yang bahkan belum mengenal siapa pemerintah dan penguasa mereka. Untuk itu salah satu tugas dari F-FDTL adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang peran dari pemerintah beserta lembanganya serta peran angkatan bersenjata.[38]

Ada ketumpangtindihan antara relasi militer dan para politisi khususnya penguasa, karena sampai saat ini kebanyakan politisi sipil beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan absolut atas angkatan bersenjata. Dalam kaitannya dengan ini Filomeno Paixao menjelaskan bahwa konsepnya masih tetap sama, yakni militer akan tetap berada dibawah kekuasaan politik, jelasnya politik adalah panglima. Tapi politik harus tunduk pada hukum dan konstitusi dan dengan itu mereka mempunyai

[35] Sumber Fundasaun Mahein, Dili, 06-07, 2010.
[36] Lihat George Aditjondro, *Ninjas, Nanggalas, Monuments, and Mossad Manuals: An Anthropology of State Terorr in East Timor.* Dalam Jeffrey A. Sluka (Ed), The Anthropology of State Terror. University of Pennsylvania Press, 2000.
[37] Lihat Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia.* Cornell University Press,1978.
[38] Wawancara dengan Filomeno Paixao, Komandan Umum F-FDTL, Tasi Tolu, Dili, 2 Juli 2010.

legitimasi atas militer. Agar setiap orang tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara ini.[39]

Dalam usahanya memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat, F-FDTL yang didampingi oleh para pasukan Australia membentuk CMIC (Civil Military Cooperation). Tujuan dari pembentkan organ ini adalah untuk memberikan bantuan medis bagi masyarakat yang membutuhkan, memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan di wilayah pedesaan serta mengadakan program pemberantasan buta aksara.[40]

Di negara post konflik seperti Timor-Leste, kecenderungan militer untuk mengambil bagian dalam kekuasaan sangat besar. Sejauh mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik, mengembangkan kemampuan para stafnya agar lebih profesional, kemungkinan untuk memegang kekuasaan tetaplah besar.[41]

Matias Boavida, pengamat sipil militer dari Universitas Nasional Timor Lorosae, menegaskan bahwa relasi antara sipil dan militer di Timor-Leste merdeka sangat berbeda dengan negara post konflik lainnya. Karena bagaimanapun FALINTIL eksis karena bantuan dari penduduk pedesaan yang dengan setia memberikan dukungan pada masa perjuangan, karena itu untuk jangka panjang relasi ini masih sangatlah kuat.[42]

Tetapi konsep Civic Military Cooperation yang dikembangkan saat ini dianggap terlalu mengadopsi sistem yang diterapkan oleh militer Australia. Dalam hal tertentu konsep ini tidak terlalu relevan dengan situasi di Timor-Leste sekarang melihat bahwa dibandingkan dengan F-FDTL angkatan bersenjata sudah sangat maju dan canggih.[43]

Mengenai kedekatan antara sipil dan militer, Jose Texeira, anggota Parlemen dari Fraksi FRETILIN serta anggota Komisi B yang menanggani persoalan pertahanan dan keamanan meyakini bahwa sebetulnya relasi antara angkatan bersenjata dan kalangan sipil sudah terbentuk sejak 24 tahun silam,yang perlu dilakukan di masa depan adalah bagaimana memperkuat hubungan itu melalui tindakan yang konkret. Artinya bagaimana militer lebih berperan membantu masyarakat sipil di wilayah pedesaan ketimbang berdiam diri di barak-barak mereka.[44]

Sebagai negara yang baru melepaskan diri dari belenggu koloanialisme, Timor-Leste seharusnya mengadopsi praktek hubungan sipil-militer yang terjadi di Mozambique. Di mana di negara terjadi kesatuan yang sangat erat antara militer dan sipil.[45]

Satu hal yang menjadi persoalan utama dalam pengembangan aktivitas F-FDTL selanjutnya adalah—walaupun mereka mempunyai seorang Sekertaris Negara Pertahanan—tetapi menurut Jose Texeira orang ini tidak bisa diandalkan karena

[39] Wawancara dengan Filomeno Paixao, Komandan Umum F-FDTL, Tasi Tolu, Dili, 2 Juli 2010.
[40] Wawancara dengan Filomeno Paixao, Komandan Umum F-FDTL, Tasi-Tolu, 2 Juli 2010.
[41] Wawancara dengan Matias Boavida, Dosen Ilmu Politik Universitas Nasional Timor-Lorosae. Dili, 4-07-2010.
[42] Wawancara dengan Matias Boavida, Dosen Ilmu Politik Universitas Nasional Timor-Lorosae. Dili, 4-07-2010.
[43] Wawancara dengan Jose Texeira Anggota Parlemen dari Fraksi Fretilin dan anggota Komisi B. Dili, 2-Juli, 2010.
[44] Wawancara dengan Jose Texeira Anggota Parlemen dari Fraksi Fretilin dan anggota Komisi B. Dili, 2-Juli, 2010.
[45] Wawancara dengan Jose Texeira Anggota Parlemen dari Fraksi Fretilin dan anggota Komisi B. Dili, 2-Juli, 2010.

terlalu banyak konsep yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi Timor-Leste sekarang.[46] Dengan latar belakangnya sebagai pengamat sipil militer, menurut Jose Texeira konsep sipil militer Indonesia sangat berbeda dengan keadaan Timor-Leste sekarang.

Memperkuat relasi antara angkatan bersenjata dengan masyarakat sipil di Timor-Leste sangatlah penting untuk saat ini maupun ke depannya. Berkaca pada pengalaman krisis politik militer pada tahun 2006 dan menurunnya kepercayaan masyarakat sipil terhadap institusi angkatan bersenjata dan kepolisian, maka formula baru perlu ditemukan untuk membentuk kembali jalinan antra sipil dan militer.

Pengamat hukum militer, Cirilio Cristovao menjelaskan bahwa krisis pada tahun 2006 seyogyanya menjadi pelajaran berharga bagi PNTL dan F-FDTL. Untuk ke depannya semua golongan yang ada di Timor-Leste harus tunduk pada hukum yang berlaku serta harus ada kemauan politik yang diantara para pemimpin dan politisi untuk tidak melibatkan militer di dalam politik praktis.[47]

Banyak pengalaman menunjukkan bahwa politisi sipil yang berada dalam kekuasaan cenderung mempertahankan kekuasaan mereka dengan memanfaatkan atau menarik angkatan bersenjata di pihak mereka. Pengalaman ini bisa kita temukan di negara-negara post-konflik di benua Afrika dan Amerika Latin. Militer memang berada dibawah kekuasaan sipil, tapi mereka harus difungsikan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku di dalam konstitusi agar Timor-Leste tidak mengulangi sejarah kelam di negara-negara post konflik lainnya.[48]

Yang masih menjadi peghalang utama ke depannya adalah relasi antara PNTL dan F-FDTL yang masih sangat rentan. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyatukan ke dua institusi ini. Diantaranya operasi gabungan dalam mengejar Gastao Salsinha dan para pengikutnya pada tahun 2008, terhadap gerombolan ninja pada tahun 2009 dan pelatihan bersama lainnya.

Tetapi aktivitas-aktivitas yang bersifat kondisional ini tidak langsung menghapus kecurigaan antara ke dua institusi yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Kondisi ini tidak cenderung membaik ketika Perdana Menteri Kayrala Xanana Gusmão menunjuk Longuinhos Monteiro sebagai Komandan PNTL menggantikan pejabat lama, Afonso de Jesus.

Obsesi Longuinhos Monteiro untuk terus mempersenjatai PNTL dan menyelenggarakan latihan-latihan dengan menggunakan metode militer tidak lepas dari perhatian masyarakat sipil dan element-elemen tertentu di dalam pemerintahan.[49]

Relasi antara PNTL dengan penduduk sipil ibarat api dalam sekam karena seringkali peralatan negara seperti senjata tidak hanya digunakan untuk menjalankan patroli, tetapi juga untuk memburu ternak peliharaan penduduk di wilayah pedesaan.[50]

Ada sebagian pihak mengusulkan agar PNTL lebih mengembangkan Polisi Komunitas ketimbang membangun sebuah institusi bergaya militer. Filomeno Paixao, Komandan Umum F-FDTL menjelaskan, dalam konstitusi sudah ada peran yang jelas, yakni PNTL bertanggungjawab terhadap keamanan di dalam negeri dan

[46] Wawancara dengan Jose Texeira Anggota Parlemen dari Fraksi Fretilin dan anggota Komisi B. Dili, 2-Juli, 2010.
[47] Wawancara dengan Cirilio Cristovao, Dili. 3-07-2010.
[48] Wawancara dengan Cirilio Cristovao, Dili. 3-07-2010.
[49] Lihat Lian Mahein, edisi 6 Juni 2010.
[50] Lihat Lian Mahein, edisi 6 Juni 2010.

ancaman dari luar sepenuhnya merupakan wewenang dari F-FDTL.[51] Kecuali jika PNTL ingin menggantikan peranan dari F-FDTL.

Ada sebagian perwira PNTL juga cenderung menolak tendensi 'pemiliteran PNTL.' Inspektor Pedro Belo, Komandan PNTL Distrik Dili menegaskan bahwa secara pribadi dia tidak setuju dengan militerisasi polisi karena tidak sesuai dengan peraturan kepolisian.[52] Perbedaan pemikiran antara para komandan ini bisa berujung pada ketidakharmonisan dalam hal pengambilan keputusan dan penerapannya. Kalau hal ini sampai terjadi di masa depan, makanya sangat mengancam eksistensi antara sipil dan militer dan tidak menutup kemungkinan akan mengoyahkan stabilitas keamanan di negeri ini.

Menurut komadan PNTL Distrik Dili Pedro Belo, sistem dan sumpah antara militer dan PNTL berbeda, disamping itu mereka juga memiliki fungsi yang berbeda. Timor-Leste sudah mempunyai Polisi Militer dan mereka bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Yang bisa dilakukan oleh PNTL ke depannya adalah membentuk Polisi Komunitas di berbagai distrik dengan melibatkan otoritas lokal seperti Kepala Suku, Ketua RT dan Dewan Desa. Tujuan dari program ini adalah untuk lebih mendekatkan polisi ke komunitas. Polisi Komunitas harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat, bersikap terbuka dan siap melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayah mereka masing-masing.[53]

Konsep ini nyaris sama dengan di Indonesia, dimana di beberapa wilayah dibentuk Polisi Kehormatan. Yang menjadi bagian dari Polisi Kehormatan ini adalah orang-orang sipil yang dianggap berpengaruh di wilayah di mana mereka tinggal dan bisa menjadi panutan penduduk sekitarnya. Mereka merupakan pihak pertama yang bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungannya dan melakukan konsultasi secara reguler dengan pihak keamanan dalam hal ini Polisi.[54]

Untuk kondisi di Timor-Leste antara PNTL dan F-FDTL harus ada pembagian fungsi dan tanggungjawab yang jelas. Di pihak PNTL pembentukan polisi komunitas merupakan prioritas utama dalam waktu dekat ini. Seperti dikatakan oleh Pedro Belo, bahwa telah diselenggarakan pertemuan reguler mulai dari tingkat nasional sampai subdistrik, dan pertemuan ini akan dilakukan sebulan sekali dan melibatkan komunitas sekitarnya. Salah satu tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk memperoleh informasi secara langsung dari komunitas mengenai perkembangan situasi di wilayah mereka masing-masing. Pedro Belo mengakui bahwa memang aktivitas ini belum bisa dikatakan 100% tetapi paling tidak usaha untuk lebih menyatukan polisi dengan komunitas telah dimulai.[55]

Layaknya gerakan pembebasan nasional di negara lain, dimana orang-orang yang menjadi aktor dalam proses itu kelak menjadi penguasa di negara yang merdeka. Nampaknya Timor-Leste menggulangi pengalaman negara-negara post-konflik di daratan Afrika, Asia dan Amerika Latin.

Hal ini bisa diamati dari dominanya para bekas pemimpin gerakan pembebasan di tubuh pemerintahan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa para pemimpin gerilya sangat cekatan menyusun strategi dalam melawan musuh, tetapi seringkali tidak cakap dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Xanana Gusmao sebagai

[51] Wawancara dengan Menu Paixao, Komandan Umum F-FDTL, Tasi Tolu, Dili, 2 Juli 2010.
[52] Wawancara dengan Inspektur Pedro Belo, Dili, 4,07, 2010.
[53] Wawancara dengan Inspektur Pedro Belo, Dili, 4,07, 2010.
[54] Lihat Budi Argawa, dimuat dalam, ttp://warnawarnibali.wordpress.com/2005/12/20/bermodal-rompi-dan-lencana/
[55] Wawancara dengan Inspektur Pedro Belo, Dili, 4,07, 2010.

Perdana Menteri memahami betul hal ini, demi melancarkan programnya, dia menempatkan sebagian besar para veteran FALINTIL di dalam parlamen maupun pemerintahan dengan disertai beberapa teknokrat tentutnya. Seringkali gaya militeristik digunakan untuk mencapai tujuan dan menuntut loyalitas dalam pemerintahannya.

Bisa dilihat bahwa kontrol sipil terhadap militer menjadi sangat lemah, karena Xanana Gusmao disamping menjabat sebagai Perdana Menteri dia juga memegang pos sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, kalaupun ada dua orang Sekertaris Negara yang membawahi Polisi dan F-FDTL, banyak pihak memandang bahwa ini hanya sekedar usaha Xanana dalam menutupi sisi lain dari pemerintahannya yang cenderung militeristik.

Kesimpulan

Dari uraian singkat diatas, kita bisa menarik sebuah pelajaran bahwa meskipun di tengah-tengah hiruk-pikuk politik dan usaha untuk menunggangi ke dua institusi—PNTL dan F-FDTL—tetapi mereka terus berusaha untuk mengembangkan diri dan membangun relasi yang lebih dekat dengan sipil.

Untuk tidak menggulangi krisis yang lebih besar di masa depan, maka sangat mendesak bagi para anggota PNTL dan F-FDTL untuk memahami sejarah perjuangan Timor-Leste, bagaimana sebuah bangsa yang awalnya hanya sebatas imaginasi kelompok diaplikasikan menjadi sebuah cita-cita kolektif. Pemahaman sejarah sangatlah penting untuk memperkuat nasionalisme di kalangan PNTL-F-FDTL.

Perlu juga dilakukan pembenahan di tubuh F-FDTL dari segi institusional. Yang paling serius adalah diangkatnya Letnan Kolonel Pedro Klamar Fuik sebagai Komandan Marinir. Banyak pihak menggangap bahwa Pedro juga terlibat dalam krisis 2006.[56] Klarifikasi perlu dilakukan oleh para petinggi F-FDTL untuk menepis keraguan publik tentang komandan ini.

Penguatan nasionalisme sangatlah penting untuk mendekatkan kembali F-FDTL dan PNTL ke tengah-tengah rakyat dan menghapus kesan bahwa ‘ikan yang selama ini bergantung pada air semakin jauh dari habitatnya.’

[56] Wawancara dengan sumber Fundasaun Mahein, Dili, 20 Juni, 2010.

Sumber:

Budi Argawa, dimuat dalam
http://warnawarnibali.wordpress.com/2005/12/20/bermodal-rompi-dan-lencana/ last accessed, 06 of July, 2010.
Carmel Budiardjo and Liem Soei Liong, *The war Against East Timor.* Zed Books, 1984.

George Yunus Aditjondro, *Timor Lorosa'e On the Crossroad: Timor Lorosa'es transformation from Jakarta's Colony to a global capitalist outpost.* CeDSoS, 2001.
George Aditjondro, *Ninjas, Nanggalas, Monuments, and Mossad Manuals: An Anthropology of State Terorr in East Timor.* Dalam Jeffrey A. Sluka (Ed), The Anthropology of State Terror. University of Pennsylvania Press, 2000.
Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia.* Cornell University Press, 1978.
Helen Hill, *Stirring of Nationalism in East Timor: Fretilin 1974-1978, The Origins, ideologies and strategies of a nationalist movement.* Otford Press, 2002.
Irena Cristalis, *East Timor: A Nation's Bitter Dawn.* Zed Books, 2009.
John G. Taylor, *East Timor: The Price of Freedom.* Zed Books, 1999.
Laporan Komisi Khusus Independen Untuk Timor-Leste, Oktober 2006.
Morris Janowitz, *Military Institutions and Coercion in the Developing Nations.* The University of Chigaco Press, 1977.
Michael T. Klare & Peter Kornbluh, ed, *Low Intensity Warfare: Counterinsurgency, Proinsurgency, And Antiterrorism in the Eighties.* Pantheon Books 1988.
Nugroho Katjasungkana, *Dampak Invasi dan Pendudukan Indonesia terhadap Gerakan Pembebaasan Nasional Timor-Leste.* Dalam Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia, Baskara T. Wardaya, dkk. ELSHAM, 2007.
Samuel P. Huntington, *Reforming Civil-Military Relations.* Journal of Democracy - Volume 6, Number 4, October 1995.
Sara Niner, *Xanana: Leader of the Struggle for Independent Timor-Leste.* Australia Scholarly Publication, 2009.
Sara Niner *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmao.* Aurora books, 2000.
W.F. Wertheim, Evolution and Revolution*: The Rising Waves of Emancipation.* Penguin Books 1974.

Terbitan:

The Australian, Desember 1, 1999.

Wawancara Nara Sumber:

Wawancara dengan Cirilio Cristovao, Pengamat militer, Dili. 3-07-2010.
Wawancara dengan Filomeno Paixao, Komandan Umum F-FDTL, Tasi Tolu, Dili 2 Juli 2010.
Wawancara dengan Jose Texeira Anggota Parlemen dari Fraksi Fretilin dan anggota Komisi B. Dili, 22-Juni, 2010.
Wawancara dengan Matias Boavida, Dosen Ilmu Politik Universitas Nasional Timor-Lorosae. Dili, 4-07-2010.
Wawancara dengan PNTL Komadan Distrik Dili, Pedro Belo, Dili, 4,07, 2010